



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI., berkedudukan di Jalan Negara No.300 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Johan Sinaga, S.E., M.AP.**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 90/18.13/TAHUN 2023 tertanggal 17 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Mayhardy Indra Putra, S.H., M.H.**, Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Km.55 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18.13/620/3499/2023, tanggal 01 Desember 2023., selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada : **Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H., dan kawan-kawan.**, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Jalan Negara Km.55 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 4028/L.2.29/GP.1/12/2023, tanggal 11 Desember 2023. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Terhadap :

SAPARUDDIN., Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 27 Desember 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 29 Desember 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian sebesar Rp48.650.992,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1289 tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama EL HIDAYAT, sesuai nomor urut daftar nominatif 4 dari Pemohon kepada Termohon SAPARUDDIN (yang menguasai dan memiliki objek tanah tersebut);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjalankan penawaran tersebut kepada Termohon dengan keterangan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah bertemu serta berbicara dengan Termohon yang bernama Saparuddin dan Termohon menyatakan tidak setuju atau menolak atas penawaran pembayaran uang ganti kerugian atas tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Pengantar Nomor : B-4062/L.2.29/Gp.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Surat Permohonan Konsinyasi nomor urut Nominatif 4 An. Saparuddin, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Identitas Pemohon dan Kuasa Pemohon, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Identitas Termohon, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 90/18.13/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 143/18.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 375/18.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Ringkasan Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1289 An. Pemegang Hak EL HIDAYAT kepada SAPARUDDIN, tanggal 14 April 2011, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Undangan dan Daftar hadir Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 01/BAM/PUPR/XI/SB/2021, tanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy surat Penolakan Tanda Tangan terkait Ganti Kerugian, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat Keterangan Desa Firdaus Nomor : 592.1/2030/18.40.13/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penguasaan Tanah dan Bangunan milik Saparuddin, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13 ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka telah nyata adanya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Pelebaran Jalan Negara di Kabupaten Serdang Bedagai, dan tanah milik Termohon adalah bagian dari lahan yang ditetapkan/diperlukan agar terlaksananya pembangunan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pembangunan pelebaran jalan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang bermanfaat kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk peningkatan perekonomian sehingga patut untuk segera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengadaan tanah bagi pembangunan jalan merupakan maksud yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 3 Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang mengatur bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa, Negara, dan Masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak;

Menimbang, bahwa telah nyata pula adanya perhitungan ganti rugi terhadap tanah Termohon, yang telah dilakukan penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan besaran ganti rugi telah ditetapkan dalam musyawarah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya jaminan terhadap kepentingan Pemohon sebagai pihak yang berhak dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan dengan memperhatikan kepentingan umum maka pengadaan tanah tersebut patut dijalankan demi terlaksananya pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata konsinyasi, Kewenangan Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo adalah tentang keabsahan penitipan uang ganti kerugian dalam hal Termohon menolak untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 89 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dimana pasal 89 ayat (5) mengatur bahwa Pelaksanaan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan keabsahan penitipan ganti kerugian yang telah dikabulkan maka demi menjalankan ketentuan tersebut Pemohon patut segera melakukan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari semenjak penetapan ini diucapkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 serta ketentuan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp48.650.992,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1289 tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama EL HIDAYAT, sesuai nomor urut daftar nominatif 4 dari Pemohon kepada Termohon SAPARUDDIN (yang menguasai dan memiliki objek tanah tersebut) ;
dari Pemohon kepada Termohon SAPARUDDIN;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas, dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.893.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah serta Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Panitera,

Ketua Pengadilan,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp	1.725.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
5. Materai	Rp	30.000,00
6. PNBP	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.893.000,00

Terbilang : satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)